

Krisis Ekonomi Global, Neoliberalisme, dan Geliat Neososialisme

Oleh Gatut Saksono

I. Wibowo dalam Kata Pengantar di *Neoliberalisme* (2003) mengatakan bahwa istilah Neoliberalisme ini baru muncul kurang lebih tiga puluh tahun yang lalu. Tetapi kehadirannya dapat dirasakan hingga seluruh segi-segi kehidupan, bukan hanya dibidang ekonomi, melainkan di seluruh sendi kehidupan masyarakat di seluruh pelosok dunia. Neoliberalisme yang datang berbarengan dengan globalisasi ini bukan hanya dipakai untuk mengatur ekonomi sebuah negara, melainkan untuk mengatur ekonomi global. Melalui dukungan teknologi komputer dan informasi yang canggih, kekuatan kapitalis lokal bergabung dengan kekuatan kapitalis global, bersama-sama mencoba mengeruk kekayaan planet bumi sembari menjanjikan bahwa kemakmuran global akan menjadi kenyataan lebih cepat daripada yang diinginkan (Wibowo, dalam *Neoliberalisme*, 2003, hlm. 2).

Ada beberapa faktor yang mendorong munculnya neoliberalisme. Pertama, munculnya perusahaan multinasional sebagai kekuatan yang nyata dan bahkan memiliki aset kekayaan yang lebih besar daripada negara-negara kecil di dunia. Mereka ini rata-rata mempunyai kantor pusat di negara-negara maju (Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, Jepang, Australia) dengan memanfaatkan semua fasilitas infrastruktur yang dimiliki negara-negara itu. Gerak mereka bukan dibimbing oleh nasionalisme, melainkan insting mengeruk laba di mana pun kesempatan itu ada di muka bumi. Pada saat kritis mereka dapat mengubah modal yang begitu besar yang mereka miliki menjadi *bargaining power*, dan memaksa negara-negara bertekuk lutut, bahkan juga negara rumah asal mereka.

Kedua, untuk menjamin bahwa negara-negara di seluruh dunia patuh menjalankan prinsip pasar bebas dan perdagangan bebas, di dunia ini dikenal organisasi dan konstitusi internasional yang terus menerus memantau negara-negara (*surveillance system*). Institusi internasional itu antara lain: *World Trade Organization* (WTO), yang dapat menjatuhkan hukuman pada negara-negara yang tidak patuh pada perdagangan bebas; *World Bank*; dan *International Monetary Fund* (IMF).

Ketiga, sebagai variabel independen dari semua ini adalah revolusi di bidang teknologi komunikasi dan transportasi yang amat dahsyat selama 20 tahun terakhir ini. Bagi pelaku bisnis perkembangan memang diharapkan karena dengan demikian mereka tidak lagi mengalami hambatan apa pun untuk mengerakkan barang maupun modal atau pun mengkoordinasikan produksi ke mana-mana.

Keempat, Negara-negara kuat (umumnya negara maju) memakai kekuatan yang dimilikinya untuk menaklukkan negara yang lebih lemah (umumnya negara-negara yang sedang berkembang). Untuk contoh khusus ini kita lihat agresi Amerika Serikat terhadap negara-negara yang jadi sasaran eksploitasinya (Ibid., hlm. 3 s.d. 5).

Salah satu negara (yang sedang berkembang) yang menjadi

sasaran globalisasi berikut ideologi neoliberalisme adalah Indonesia. Indonesia dewasa ini sedang dilanda kuat oleh arus kapitalisme-liberalisme dengan intensitas yang semakin tinggi. Kapitalisme mendapat roh baru—neoliberalisme—dengan ide dasar bahwa kodrat yang sama dan terutama adalah *homo economicus* dan dengan demikian semua aktivitas manusia akan diabdikan dan ditujukan untuk mencapai dan melalui pertimbangan-pertimbangan ekonomi. Transaksi dalam kegiatan ekonomi bukan hanya sekedar salah satu bentuk dari model hubungan antar-manusia (Saksono 2008 b, hlm. 57).

Dalam era globalisasi ini, bangsa Indonesia setiap saat senantiasa dipengaruhi, dipaksa menelan pemahaman yang seakan-akan paling benar, bahwa keikutsertaan dalam globalisasi ekonomi adalah suatu keharusan mutlak yang dapat membawa bangsa ini meraih cita-cita kesejahteraan bersama; pasar bebas (diartikan sebagai) jalan menuju investasi; desentralisasi (seolah-olah) adalah demokrasi, dan jaring pengaman sosial (seolah-olah) adalah penjaga stabilitas. Dengan kata lain, kita dipaksa untuk mempercayai bahwa kapitalisme-lah yang menyediakan surga, dan pasar bebaslah yang menawarkan kebahagiaan (Ibid.).

Titus Odong Kusumajati, secara sederhana mengatakan bahwa globalisasi adalah sebuah proses internasionalisasi, proses menduniakan sesuatu, atau dari sisi lain, globalisasi juga dapat dipandang sebagai hapusnya batas-batas maya geografi negara. Jenis globalisasi

yang sampai saat ini banyak mendapat perhatian adalah globalisasi ekonomi, yaitu suatu kondisi ekonomi global dengan sistem pasar bebasnya dan hak milik individu dijadikan tulang punggung, serta pasar dunia didominasi oleh perusahaan multinasional/transnasional. Praktek globalisasi ekonomi tersebut juga mendominasi hampir semua aspek kehidupan manusia secara legal. Globalisasi memberikan ruang yang subur bagi semakin tumbuhnya neoliberalisme (yang memang merupakan saudara kembarnya) dan kapitalisme-imperialisme baru. Neoliberalisme

Lebih Jauh tentang Globalisasi

Di tahun 1947, Friedrich August Von Hayek, ekonom Austria, mengorganisasi sebuah konferensi tertutup selama sepuluh hari di Mont Pelerin, Swiss. Mereka yang diundang Milton Friedman, George Stigler, Karl Popper, dll. Dalam konferensi itu dibentuk sebuah kesepakatan membentuk kelompok dengan nama *The Mont Pelerin Society* (MPS). Setelah itu mereka mengadakan pertemuan setiap dua tahun sekali, dan pada 1970-an, jaringan mereka semakin meluas. Mereka disatukan oleh keprihatinan atas munculnya gelombang "kolektivisme" yang melanda Eropa. Sesudah tahun 1937, ketika komunisme dan fasis berkembang pesat, Hayek menerbitkan artikel berjudul *Economics and Knowledge*. Dalam artikel itu ia mengatakan bahwa kapitalisme pasar bebas bukan sekedar bentuk sosial, tetapi sebuah mekanisme alami untuk mengelola informasi (Priyono 2003 dalam Neoliberalisme, hlm. 52).

Tujuh tahun kemudian, 1944, Hayek menerbitkan *The Road to Serfdom*, sebuah kritik tajam terhadap sosialisme dan segala bentuk ekonomi perencanaan sentral. Dalam buku ini Hayek mengajukan keunggulan kapitalisme pasar bebas dengan membiarkan jutaan individu mereaksi secara individual terhadap harga pasar yang tercapai secara bebas. Terjadilah optimalisasi alokasi modal, kreativitas manusia, dan tenaga kerja dengan cara yang tidak mungkin ditiru oleh perencanaan sentral, secerdik apa pun perencanaan itu (Ibid).

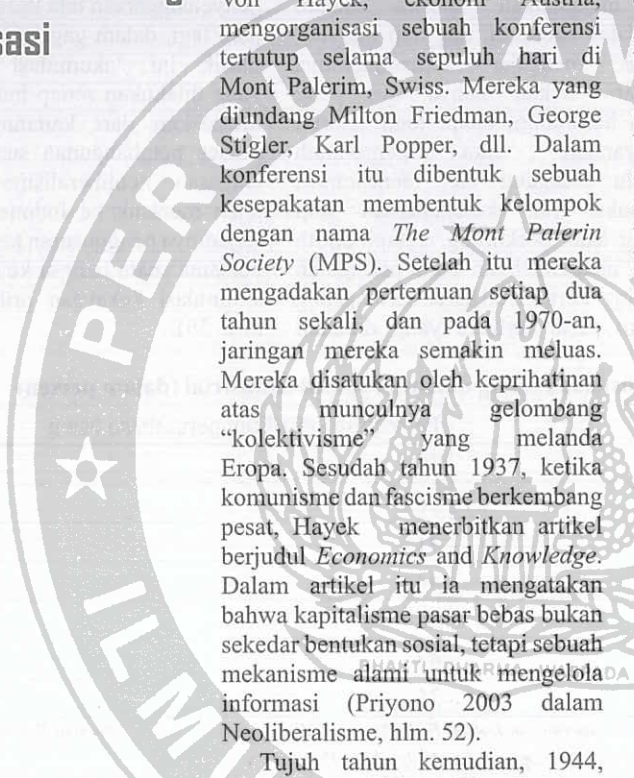
Orang sering menyebut Hayek dan Milton Friedman sebagai bapak

sering dipahami sebagai isme yang mempunyai "roh jahat", bersifat eksploitatif, mementingkan pencapaian keuntungan individu, mengabaikan kepentingan publik (Kusumadjadi 2005).

ekonomi Neoliberalisme. Friedman dikenal sebagai penentang keras gagasan ekonomi John M. Keynes tentang campur tangan pemerintah dalam ekonomi. Kehidupan ekonomi masyarakat paling baik berlangsung tanpa campur tangan apa pun dari pemerintah. Insentif individual adalah pedoman terbaik untuk menggerakkan ekonomi. Dalam konteks itulah Friedman mencanangkan prinsip berikut: "Ada satu, dan hanya satu, tanggung jawab sosial bisnis, yaitu menggunakan seluruh sumber daya untuk aktivitas yang mengabdikan akumulasi laba..." (Ibid., hlm. 53).

Pikiran-pikiran ekonomi (pra-) Neoliberalisme semacam ini mulai mendapat perhatian dari Margaret Thatcher dan Ronald Reagan ketika mereka pegang tampuk kekuasaan di Inggris (1979) dan Amerika Serikat (1980). Hayek dan Friedman tidak membantah bahwa pasar dapat gagal dan memang telah gagal, tetapi mereka meyakini bahwa pasar bebas mampu mengalokasikan barang-barang dan jasa secara lebih efektif dibandingkan negara, dan bahwa usaha-usaha negara dalam memerangi kegagalan pasar lebih mendatangkan kerugian daripada keuntungan (Heertz 2003, dalam Neoliberalisme, hlm. 20).

Manusia pertama-tama dan terutama, dalam pandangan Neoliberalisme adalah manusia ekonomi. Itulah ontologi (kodrat) manusia. Hubungan-hubungan antar-pribadi dan sosial kita mesti dipahami dengan menggunakan konsep dan tolok ukur ekonomi. Jadi *ontologi economicus* punya implikasi pada



epistemologi (cara pandang) *economicus* pula. Karena itu kemacetan yang terjadi atau pun perubahan yang ingin dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan juga hanya bisa dipahami dan didekati dengan konsep dan solusi ekonomi (sistem pasar).

Prinsip ekonomi juga merupakan tolok ukur untuk mengevaluasi berbagai tindakan dan kebijakan pemerintah suatu negara. Ontologi dan epistemologi *economicus* pada gilirannya melahirkan etika *economicus* pula. Jika liberalisme klasik abad ke-18 menuntut pemerintah-pemerintah untuk menghormati kinerja pasar sebagai salah satu cara jitu kehidupan ekonomi, neoliberalisme

menuntut kinerja pasar bebas sebagai satu-satunya tolok ukur untuk menilai berhasil tidaknya semua kebijakan pemerintah. 'Pasar Bebas' adalah meja pengadilan bagi kebijakan pemerintah. Gagasan ini berbeda dengan liberalisme klasik abad ke-18 (Priyono 2003, dalam Neoliberalisme, hlm. 54 s.d. 55).

Pada saat Adam Smith (1723 s.d. 1790) mengemukakan teorinya ia mengatakan bahwa dalam transaksi ekonomi, tiap-tiap individu bebas mengejar kepentingannya sendiri, bukan hanya dia yang akan beruntung, tetapi juga seluruh masyarakat. Jika pemerintah terlalu mengatur dan mencampuri transaksi itu, kesejahteraan tiap orang akan berkurang. Tetapi Smith juga menambahkan satu peringatan penting, Pertukaran harus berlangsung dalam pasar terbuka yang ditandai

oleh persaingan banyak pelaku (jadi bukan dikuasai oleh lima atau sepuluh konglomerat saja), karena monopoli membawa malapetaka dan menghasilkan alokasi sumber daya yang tidak adil dalam masyarakat, serta justru mengurangi tingkat kesejahteraan masyarakat (Ibid., hlm. 55).

Liberalisme Smith tetap memberi ruang pada peran pemerintah lewat penyelenggaraan tata keadilan. Lebih jauh lagi, dalam gagasan liberalisme klasik ini 'akumulasi kekayaan' yang dilakukan setiap individu tidak dilepaskan dari kaitannya dengan proses pembangunan suatu bangsa. Gagasan neoliberalisme ini juga telah merasuk ke Indonesia dengan terjadinya pengusuran kesejahteraan bersama suatu bangsa ke arah tujuan akumulasi kekayaan pribadi (Ibid., hlm. 56).

Tabel 1. Kehadiran Perusahaan Asing dalam Produksi Industrial (dalam persen)

Negara	Persentase kehadiran perusahaan asing
Korea Selatan (1978)	19
Taiwan (1976)	16
Argentina (1972)	31
Brazil (1977)	44
Chile (1979)	28
Columbia (1974)	43
Mexico (1970)	35

Sumber : Rhys Jenkins (1991) 'Tax Reform: Lessons Learned', in Dwight H. Perkins and Michael Roemer (eds.) *Reforming Economic Systems in Developing Countries*, Harvard Institute for International Development, Cambridge, MA: Harvard University Press.

Tabel 2. Ke Mana Modal Mengalir? Investasi Langsung Amerika Serikat ke Luar Amerika Serikat, tahun 2000

Ke Mana Investasi AS Mengalir	Jumlah (milyar \$ AS)	Persentase dari Total
Negara-negara berpendapatan tinggi	982,8	81,0
Negara-negara berpendapatan menengah	218,1	18,0
Negara-negara berpendapatan rendah	12,2	1,0
Total	1.213,1	100,0

Sumber : *The Economist, A Survey of Globalisation* (29 September 2001), hlm. 6.

Tabel 3. Kekayaan yang dikuasai Golongan Kaya dan Miskin (lingkup global, dalam persen)

Tahun	20% Terkaya	20% Termiskin	Ratio Income Kaya/ Miskin
1960	70,2	2,3	30 : 1
1970	73,9	2,3	32 : 1
1980	76,3	1,7	45 : 1
1989	82,7	1,4	59 : 1

Sumber : United Nations Development Programme, Human Development Report (1992)

Menurut Henry Priyono, pada tahun 1960 dunia sudah dilanda adanya kesenjangan sosial. Tetapi kesenjangan itu dari tahun ke tahun bukannya makin surut meskipun sudah ada janji Neoliberalisme di tiga dasawarsa terakhir. Globalisasi dengan neoliberalismenya yang menjanjikan kemakmuran ekonomi individu-individu justru semakin memperlebar kesenjangan ekonomi individu. Di tahun 1960-an 20% warga terkaya dunia menguasai 70,2% kekayaan dunia, sedang 20% warga termiskin menerima 2,3% saja. Pada tahun 1989, penguasaan itu sudah menjadi 82,7% (di tangan 20% warga terkaya) dan 1,4% saja di tangan 20% warga termiskin dunia (Saksono 2007, hlm. 127).

Sementara itu, menurut Kompas 15 April 2006 di hlm. 34 dikatakan bahwa jumlah penduduk miskin Indonesia pada tahun 2005 mencapai 35,1 juta orang. Angka ini lebih baik dibandingkan dengan tahun 2000, terdapat 38,7 juta penduduk yang miskin. Tetapi angka pengangguran terbuka bertambah. Pada tahun 2000 hanya ada 5,8 juta pengangguran terbuka, sementara pada tahun 2005 menjadi 10,9 juta usia produktif yang menganggur.

Dari antara 178 perusahaan go publik di Indonesia, misalnya 67,1% dikuasai oleh keluarga-keluarga bisnis, dan hanya 5,1% di tangan publik. Bisa diduga, konsentrasi pemilikan itu ada di tangan keluarga-keluarga seperti Salim, Bob Hasan, Soeharto, dan keluarga-keluarga bisnis *non-cronies*. Lebih lugas lagi, lima keluarga bisnis di Indonesia menguasai 61,7% dari seluruh kapitalisasi pasar. Potret ini menunjukkan tingkat konsentrasi kekuasaan ekonomi yang sedemikian besar (Saksono 2007, hlm.127).

Globalisasi dalam Berbagai Aspek Kehidupan Masyarakat

Kusumajati secara sederhana mengatakan bahwa globalisasi dapat diartikan sebagai sebuah proses menduniakan sesuatu, atau dari sisi lain, globalisasi juga dapat dipandang sebagai hapusnya batas-batas maya geografi negara. Globalisasi dapat dikelompokkan menjadi globalisasi ekonomi, globalisasi ideologi, globalisasi IPTEK, dan globalisasi sosial budaya. Jenis globalisasi yang sampai saat ini paling banyak mendapat perhatian adalah globalisasi ekonomi, yaitu suatu kondisi ekonomi global yang sistem global dan hak milik individunya dijadikan tulang punggung, dan pasar dunia didominasi oleh perusahaan-perusahaan multinasional/transnasional. Praktek globalisasi ekonomi tersebut juga mendominasi hampir semua aspek kehidupan manusia secara legal (Ibid., hlm. 129).

Globalisasi dengan paradigma kedaulatan pasarnya tersebar melalui berbagai saluran dan cara. Pada tataran politik, bekerjanya pasar kerap dikaitkan dengan demokrasi. Dengan kata lain, ada kaitan yang niscaya antara pasar dan demokrasi. Tidak mengherankan, bahwa kedatangan "pasar" dalam berbagai bentuknya dipandang sebagai "awal" atau "fajar" yang menjanjikan dari datangnya demokrasi. Dan tanda dari kedatangan pasar—menurut Robert H Imam—terwujud dalam kedatangan modal-modal asing yang besar. Logika yang simplistik seperti inilah yang ditanamkan dalam benak masyarakat (Saksono 2008 a, hlm. 69).

Lebih mendalam lagi, paradigma pasar sendiri mengubah cara berpikir masyarakat. Muncul dan dominannya kapitalisme memutarbalikkan

hubungan antara masyarakat dan pasar. Pada masyarakat prakapitalistis atau bahkan dalam masyarakat pada awal beroperasinya kapitalisme, pasar merupakan bagian dari masyarakat. Operasi norma-norma pasar (ekonomi) berakar dan dibatasi oleh norma-norma sosial (kultural dan politik). Masyarakatlah yang memegang kata akhir dalam hubungan “sosial” dan “ekonomi”. Namun ketika kapitalisme sudah dominan, hubungan dibalik: masyarakatlah yang merupakan bagian dari pasar. Norma-norma masyarakat ditantang, didesak, dibatasi, dan ditekan oleh norma-norma pasar. “Bisnis” lalu menjadi paradigma utama dan pasar memiliki kedaulatannya (Ibid., hlm. 70).

Masyarakat pada umumnya belajar mengadopsi “bahasa pasar”. Penggunaan konsep efisiensi, *cost-benefit-analysis*, untung rugi, portofolio, *return of investment*, dan sebagainya sudah menjadi bagian percakapan sehari-hari, terutama melalui iklan dan ekspansi logika pasar ke dalam aspek-aspek kehidupan lainnya. Sekolah-sekolah bisnis menjamur, seolah-olah menjanjikan kelancaran karir dan masa depan yang gemilang. Pembicara-pembicara bisnis, terutama dalam bidang marketing, menjadi selebriti-selebriti baru. Mereka dipandang memiliki resep-resep sukses dan karena itu mereka berani memasang tarif yang tinggi dalam dolar. Demam sekolah bisnis, demam MBA, dan maraknya majalah bisnis juga menyumbang promosi dunia bisnis sebagai dunia paling gemilang (Ibid.).

Lebih lanjut, proses

komodifikasi menjadi prinsip dominan dan mengekspansi dunia kehidupan yang tadinya dipandang sakral dan kebal terhadap komodifikasi. Jika sebelumnya “profitabilitas” menjadi monopoli transaksi “ekonomis”, kini ia mendominasi pola pikir masyarakat. Profitabilitas menjadi tolok-ukur untuk menilai apakah sesuatu itu baik atau tidak, dapat dipertahankan atau tidak, dikelola dengan baik atau tidak, dst.nya. Modus pikir ekonomi—yang semula merupakan prinsip organisasi kehidupan ekonomi—sekarang menginvasi dunia kehidupan dan secara bertahap menjadi prinsip organisasi kehidupan sosial, politik, kultural, dan bahkan religius. Bersama dengan “efisiensi”, “profitabilitas” menjadi tolok ukur untuk program-program privatisasi. Negara sama dengan tidak efisien; tidak efisien sama dengan rugi; kerugian sama dengan tidak dapat dipertahankan. Untuk mengubah persamaan ini maka perusahaan-perusahaan negara harus diprivatisasi. Proses ini tidak mudah karena sedari awal perusahaan-perusahaan negara tidak dibangun dengan prinsip profitabilitas (Ibid., hlm. 71).

Dalam kaitannya dengan konsumsi, Imam mengatakan bahwa konsumsi bukanlah sesuatu yang baru sama sekali dan juga bukan sesuatu yang khas kapitalisme, apalagi neoliberalisme. Konsumsi adalah kebutuhan manusia. Namun demikian, konsumsi dan polanya sudah berkembang sedemikian rupa sehingga mencapai bentuk yang jauh dari bentuk awal dan primitifnya. Ia bukan lagi hanya salah satu sisi dari pasangan produksi-konsumsi, melainkan lokomotif dari gerbong kapitalisme. Penekanan kuat akan peran konsumsi—ketakutan kapitalisme akan *underconsumption* dan *overproduction*—pada sisi kultural dan sosial, mendorong tumbuhnya apa yang disebut konsumerisme. Penekanan konsumsi ini juga melahirkan berbagai industri kredit yang berusaha menjamin

tetap Bergeraknya roda konsumsi masyarakat.

Konsumerisme adalah suatu pola pikir dan tindakan sehingga orang melakukan tindakan membeli barang bukan karena ia membutuhkan barang itu melainkan karena tindakan membeli itu sendiri memberikan suatu kepuasan kepadanya. Konsep “kebutuhan” sendiri senantiasa didefinisikan oleh iklan dan segenap bentuknya mulai dari advertorial, iklan berbentuk berita dan laporan ilmiah (pariwara), iklan berbentuk hiburan, dsb.nya. Bisa saja seseorang yang terjangkau konsumerisme selalu merasa bahwa ia belanja karena ia membutuhkan barang tersebut, meskipun pada saat refleksi berikutnya, ia sadar bahwa ia tak membutuhkannya (Ibid.).

Konsumerisme juga mendapat akarnya dari anggapan bahwa agar ekonomi bisa terus berjalan dengan baik, anggota masyarakat harus terus membeli. “Membeli” dalam konteks ini adalah suatu kewajiban dan suatu tindakan sosial. Maka orang membeli meskipun tidak membutuhkan barang yang dibeli. Pada titik ini, konsumerisme memiliki dua nilai. Pertama, sebagai wujud pemuasan kebutuhan identitas dan makna, dan kedua, sebagai fungsi sosial dan ekonomis. Semula, kemampuan konsumsi atau daya beli terbatas oleh penghasilannya. Namun, berkat penciptaan kredit kemampuan konsumsi terus meningkat sambil menjerumuskan si konsumen dalam jerat hutang yang semakin besar. Tidak mengherankan bahwa dalam masyarakat ini kemampuan menabung lama kelamaan hilang. Demam Credit Card adalah salah satu perwujudannya. Kartu kredit memang menyediakan kredit agar orang bisa membeli sesuatu, namun pada saat yang sama kartu kredit menjadi instrumen memasukkan orang dalam sirkulasi kapital secara terus menerus. Di lain pihak, kartu kredit menanamkan dan mempopulerkan mentalitas tertentu yaitu “makan

dulu, kerja kemudian” (Ibid., hlm. 72).

Globalisasi dengan produknya “budaya global” hampir niscaya merupakan negasi terhadap budaya lokal masyarakat-masyarakat belahan bumi selatan. Hegemoni budaya global mendorong pendiskreditan budaya-budaya lokal sebagai budaya yang bersifat kedaerahan, kuno dan ketinggalan jaman. Pendiskreditan ini dengan sendirinya diikuti oleh peminggiran budaya-budaya tersebut. Mengingat bahwa konsumerisme bukan hanya sekedar “gaya hidup” dangkal, melainkan berakar pada suatu filsafat yang lebih dalam (individualisme) (Ibid.).

Dalam hal pengadaan pangan—Francis Wahono mengatakan bahwa—Indonesia tidak swasembada, tergantung pada persediaan dan harga di pasar internasional. Dari sudut pandang globalisasi, negara kita rentan terhadap politik ekonomi perdagangan internasional.

Berbagai aturan dan kebijakan dari WTO, terutama mengenai program pembebasan tarif dan penentuan kuota akan mempengaruhi besar kecilnya rancangan berproduksi bahan makanan bagi produsen dalam negeri. Dalam era pertanian modern ini sebagian besar dari asupan termasuk lisensi yang terkait dengan hak milik atas pengetahuan hanya dapat diperoleh dari pasar dunia yang nota bene dikuasai oleh MNCs (perusahaan-perusahaan multinasional). Akibatnya dapat diduga, besarnya nilai komponen impor terhadap asupan akan memperkecil nilai tambah yang didapat dari petani.

Melalui komponen impor asupan pertanian yang mengandung muatan kimia nonorganik—seperti pupuk buatan, pestisida, insektisida, fungisida, dan herbisida—secara tidak langsung MNCs telah menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian kesehatan manusia pemakainya. Dewasa ini telah terjadi gejala pelemahan atas sistem-sistem endoktrin seperti berkurangnya kesuburan, terjadinya deformitas genital, kelainan sistem kekebalan, kanker, gangguan rasa kepekaan, dan menurunnya kecerdasan. Kita juga mengalami pemiskinan bibit padi lokal dari jumlah yang pernah ada (8000 jenis) sebelum Revolusi Hijau. Sebagian besar bibit itu tersimpan di IRRI, Filipina, dan menjadi hak kelola FAO. Kerusakan ekosistem tanah, antara lain berkurangnya populasi cacing penggembur tanah dan ular sawah, hilangnya predator pemakan hama wereng seperti berbagai macam laba-laba, musnahnya mikroba penggembur tanah, telah mengubah perimbangan alam. Akibatnya berbagai hama muncul silih berganti dengan intensitas tinggi dan kawasan serang meluas (Ibid., hlm. 74).

Menurut Wahono, keberhasilan Orba dalam mengangkat pertanian adalah kegagalannya menyelesaikan persoalan mendasar dari pertanian itu sendiri yakni penataan atau pembaruan agraria, seluruh usaha teknologis dan monoteris hanya berakhir dengan penciptaan ketimpangan baru. Dan ketimpangan tersebut telah mendorong petani berlahan luas untuk tidak merasa bertanggung jawab atas pemeliharaan lingkungan, karena mereka lebih dirangsang untuk mengeruk keuntungan sebesar mungkin. Sedang petani gurem tidak mampu untuk membiayai konservasi lahan, dari lahan sarat kimia menjadi lahan bersih menurut kaidah pertanian organik. Maka Revolusi Hijau kendati semula seperti dewa penyelamat, yakni membebaskan petani Indonesia keluar dari perangkap involsi pertanian, membawa masuk ke perangkap

lainnya. Perangkap itu adalah globalisasi yang dituntun oleh ideologi neoliberalisme. Akhirnya empat tujuan pembangunan pertanian: mengurangi pengangguran, menghapus kemiskinan, menjembatani ketimpangan pembagian pendapatan, dan konservasi lingkungan—jauh daripada tercapai kalau tatanan agraria tidak diperbaharui menuju ke tatanan yang lebih berpihak dan bergulir dari rakyat (Ibid., hlm. 75).

Akhir-akhir ini terjadi privatisasi BUMN yang diperintahkan oleh IMF. Privatisasi ini tidak semata-mata dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja perusahaan, melainkan langsung diarahkan untuk mengubah status kepemilikan BUMN menjadi perusahaan swasta. Beberapa BUMN yang diprivatisasi itu (antara 1998 – 2002) PT Pupuk Kaltim, PT Kimia Farma, PT Telkom, PT Indosat, dan PT Semen Gresik. Privatisasi model ini selain sangat erat kaitannya dengan persoalan hutang luar negeri, sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan agenda ekonomi neoliberal. Bahkan ada kemungkinan karena dilaksanakan di tengah-tengah situasi krisis, tindakan tersebut sangat mudah untuk ditafsirkan sebagai upaya terselubung kekuatan modal transnasional yang bersembunyi di belakang IMF, untuk merampok BUMN dengan harga “obral” (Ibid., hlm. 76).

Secara konstitusional keberadaan BUMN di Indonesia tidak dapat--kata Revison Baswir--dipisahkan dari amanat Pasal 33 UUD 1945. Pada penjelasan dikatakan, “Dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilihan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang perorangan. Sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan. Bangunan perusahaan yang sesuai dengan hal itu adalah koperasi (Ibid., hlm. 76).

Dengan demikian dapat ditarik beberapa catatan: Pertama, privatisasi bukanlah cara yang tepat, apalagi merupakan satu-satunya cara untuk menanggulangi persoalan yang dihadapi oleh BUMN. Lebih-lebih kalau privatisasi itu atas perintah IMF. Perintah itu sebetulnya hanyalah sebuah jalan pintas untuk memaksakan pelaksanaan agenda ekonomi neoliberal. Dengan ekonomi neoliberal sangat mungkin disalahgunakan oleh kekuatan modal internasional untuk merampok Indonesia.

Kedua, BUMN memiliki peran yang sangat strategis dalam Sistem Ekonomi Kerakyatan. Walaupun sama-sama bergerak dalam sektor dunia usaha, fungsi BUMN dalam Sistem-Ekonomi-Kerakyatan tidak dapat disamakan dengan fungsi perusahaan swasta. Fungsi BUMN dalam sistem itu adalah sebagai instrumen penyeimbang bagi negara untuk menjamin bekerjanya mekanisme pasar secara berkeadilan (Ibid., hlm. 77).

Menurut Sofian Effendi, bagi negara-negara yang siap menjadikan pendidikan sebagai komoditi yang diperdagangkan secara internasional, Indonesia adalah pasar yang sangat menggiurkan karena memiliki jumlah penduduk usia sekolah sangat besar 102,6 juta, lebih kurang 28 kali penduduk Singapura atau hampir enam kali penduduk Australia. Penduduk usia pendidikan tinggi (19 s.d. 24 tahun) saja berjumlah 24,8 juta, sedangkan angka partisipasi perguruan tinggi baru sekitar 16 persen. Akibatnya para penjual jasa pendidikan tinggi dari luar negeri mengincar pasar besar tersebut, karena di nega-

ra mereka sendiri lembaga-lembaga dasar, menengah, dan tinggi yang bermutu, karena dibiayai oleh pemerintahnya, sedang mengalami kelebihan kapasitas akibat berkurangnya calon mahasiswa. Dari segi finansial Indonesia adalah pasar pendidikan yang besar. Pasar pendidikan akan meningkat dua kali lipat dalam waktu 10 tahun ke depan kalau pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi Indonesia mencapai angka partisipasi atau mutu pendidikan sama dengan Malaysia, Muangthai, atau Filipina. Indonesia memang pasar pendidikan yang menggiurkan baik secara demografis maupun finansial (Saksono 2008 b, hlm. 119).

Karena itu sejak berdirinya *World Trade Organization* (WTO) yang berada di luar sistem PBB pada tahun 1995, negara-negara ekonomi maju yang dipelopori antara lain oleh Amerika Serikat, Australia, Inggris, dan New Zealand, telah berjaya mendorong Kesepakatan Umum tentang Perdagangan dan Tarif (GATT), Kesepakatan Umum tentang Perdagangan Jasa (GATS), dan Kesepakatan tentang Kepemilikan Hak Intelektual yang berkaitan dengan Perdagangan (TRIPS).

GATS adalah kerangka aturan tentang liberalisasi perdagangan internasional dalam bidang jasa, yang menetapkan 12 bidang jasa komersial yang dapat diperdagangkan secara internasional. Di antaranya, lima bidang usaha jasa pendidikan yaitu jasa pendidikan dasar, jasa pendidikan menengah, jasa pendidikan tinggi, jasa pendidikan non-formal, dan jasa pendidikan lainnya.

Sebagai salah satu negara yang ikut menandatangani kesepakatan GATS, Indonesia "didesak" untuk membuka dan meliberalisasi bidang pendidikan kepada penyedia jasa dari luar negeri. Sampai saat ini sudah enam negara yang telah mengajukan permohonan (Ibid.).

Dengan alasan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang tertinggal jauh dari negara-negara lain, dan untuk

kapitalisasi modal yang diperlukan untuk menyediakan pendidikan bermutu bagi 103 juta penduduk usia pra-sekolah sampai penduduk usia pendidikan tinggi, pemerintah Indonesia menetapkan pendidikan sebagai bidang usaha yang terbuka untuk penanaman modal asing, dan menjadi bagian dari paket kebijakan liberalisasi yang ditetapkan melalui UU No. 25 tentang Penanaman Modal Asing, dan Perpres No. 77 tahun 2007 tentang Penetapan Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka untuk penanaman modal asing.

Kebijakan menetapkan pendidikan sebagai bidang usaha jasa (komodifikasi) yang terbuka untuk penanaman modal asing (liberalisasi) jelas merupakan kebijakan yang menyimpang dari cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan dan UUD 1945 (Ibid., hlm. 120).

Ideologi Alternatif

Sebelum negara-negara komunis di Eropa Timur bubar, negara-negara di dunia ketiga menjadikannya sebagai contoh apa yang dicita-citakan. Kegagalan mereka disebabkan belum berhasil atau tidak diterimanya sistem diktatur proletariat oleh rakyat di negara-negara yang lebih sering disebut sebagai negara-negara sosialis. Padahal sistem diktatur proletariat itu tiada lain adalah juga sistem demokrasi proletariat (melalui perwakilan, yang dalam hal ini diwakili oleh partai-partai komunis setempat). Pendek kata sistem demokrasi proletar semacam ini masih belum dapat diterima sehingga banyak pengamat politik mengatakan bahwa kegagalan negara-negara sosialis tersebut karena belum diterapkannya sistem demokrasi ala “Barat”, entah itu sistem demokrasi liberal atau sistem demokrasi-sosial ala negara-negara Eropa Barat.

Maka persis sebagaimana dikatakan oleh Imam Yudotomo bahwa negara-negara komunis itu gagal dan bubar karena mereka tidak/belum melaksanakan demokrasi (dalam arti demokrasi-sosial). Imam Yudotomo lebih suka menyebut paradigma ini sebagai sosial-demokrasi. Yang menjadi persoalan apakah negara-negara Eropa Barat dapat dikatakan sebagai negara-negara yang telah melaksanakan sosial-demokrasi yang dicita-citakan oleh kaum sosialis non-komunis? Pertanyaan itu bisa dijawab ya, bisa dijawab tidak. Bisa dikatakan ya, karena untuk sebagian negara-negara Eropa Barat terbangun berdasar prinsip dan hasil perjuangan politik yang dilakukan oleh kaum sosial-demokrat. (Imam Yudotomo, 2007, “Sejarah Pemikiran dan Gerakan Sosialis di Eropa”, disampaikan pada sebuah seminar di bulan Desember 2007 di Yogyakarta).

Jam kerja delapan jam sehari, upah standar yang memadai, jaminan sosial, jaminan kesehatan, jaminan perumahan, jaminan pendidikan, dan jaminan hari tua, merupakan suatu hal yang menjadi tema perjuangan

kaum buruh (sosialis) dan mereka berhasil mendorong negara untuk melaksanakannya. Kaum sosial-demokrat di Eropa Barat berhasil menjadikan negara untuk berperan sebagai pembawa kesejahteraan rakyatnya (*Welfare-State*). Boleh dikatakan banyak sekali nilai sosial-demokrat yang dipakai menjadi pedoman kehidupan umum. Nilai-nilai keadilan sosial, demokrasi dan solidaritas yang merupakan nilai-nilai sosial-demokrasi yang fundamental sudah diakui menjadi nilai kebenaran oleh seluruh (paling tidak untuk sebagian besar) masyarakat (Saksono 2008 a, hlm. 127 s.d. 128).

Namun, di sisi lain, pertanyaan itu seringkali juga dijawab dengan tidak, karena klaim kaum kapitalis yang menyatakan bahwa konsep *welfare-state* adalah konsep mereka. Apa yang sudah dicapai oleh negara-negara Eropa Barat dipropagandakan sebagai buah dari keberhasilannya. Menurut Yudotomo, klaim dari kaum kapitalis itu sebenarnya sama sekali tidak benar. Pertama, karena konsep dasar dari kapitalisme adalah pasar bebas. Mereka (kapitalisme) beranggapan bahwa negara tidak perlu ikut campur dalam urusan ekonomi. Kedua, mereka beranggapan bahwa negara yang sedikit memerintah adalah negara yang baik. Jadi—menurut Yudotomo—pengakuan kaum kapitalis tentang perlunya peran negara untuk ikut mengatur (dengan sedikit memerintah) kehidupan ekonomi sebenarnya merupakan pengakuan kaum kapitalis atas keunggulan konsep ekonomi kaum sosial-demokrat. Pasar bebas terbukti tidak bisa diandalkan untuk melakukan perencanaan dan koordinasi ekonomi. Selain itu, klaim itu juga disebabkan karena kaum sosialis membiarkan kapital tetap bisa beroperasi, sepanjang mereka menunjukkan tanggung jawab sosial dan tanggung jawab ekonominya (ekonomi pasar sosial). Dengan demikian dapat dikatakan apa yang ada di Eropa Barat untuk sebagian

memang merupakan prestasi kaum kapitalis yang sekarang telah menjelma menjadi kekuatan baru, neo-liberalis (Ibid., hlm. 129).

Eropa Barat yang telah mampu mengendalikan ekonomi pasar sambil mengembangkan berbagai jaminan sosial untuk rakyatnya, demikian pula praktek kebebasannya melalui pelaksanaan demokrasi telah dapat mensejahterakan rakyatnya di negara-negara (terutama) Eropa Barat. Akibatnya faham gerakan atau paradigma sosial-demokrasi ini menjadi idola kaum sosialis (non-komunis) di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Mereka menganggap inilah ideologi yang harus diperjuangkan. Sebuah gerakan sosialis internasional sebagai pengganti gerakan komunis internasional yang telah gagal (menurut mereka).

Keberhasilan sosial-demokrasi untuk mensejahterakan rakyat di negara-negara Eropa (terutama Eropa Barat) memang dapat dilihat dengan mata telanjang oleh sosok orang awam pun di semua penjuru dunia. Tetapi dari uraian di atas terlihat—bahkan menurut pengakuan Yudotomo sendiri—keberhasilan Eropa Barat untuk sebagian (kemungkinan sebagian besar) karena ditunjang oleh praktek kapitalisme yang juga berkembang di Eropa Barat dan bahkan telah menyebar dan berakar ke seluruh dunia, terutama di negara-negara yang sedang berkembang (di Asia, Afrika, dan Amerika Latin).

Negara-negara Eropa Barat telah berhasil mensejahterakan rakyatnya melalui ekonomi-pasar-sosial-nya. Mereka juga mendapat keuntungan

dari praktek kerja kapitalisnya yang bergerak dan berekspansi ke seluruh pelosok dunia. Modal-modal Eropa Barat dengan leluasa mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia di dunia ketiga. Bertrilyun-trilyun keuntungan mengalir ke negara-negara Eropa Barat Mereka di dalam negeri menerapkan sistem ekonomi pasar sosial atau ideologi sosial-demokrasi, tetapi ke luar mereka mengizinkan modal-modal yang berasal dari dalam negerinya untuk tetap mempraktekkan kapitalisme di negara-negara berkembang. Dengan demikian kesejahteraan rakyat yang tercapai di negara-negara Eropa Barat tidak dapat dijadikan petunjuk keberhasilan demokrasi-sosial di sana. Eropa Barat tetap melanjutkan tradisi lamanya sebagai imperialis/kolonialis kuno yang menjajah negara-negara bekas jajahannya. Mereka bersama-sama dengan Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara industri maju lainnya di Asia Timur telah menjadi pendukung utama kekuatan neo-liberalisme, sekalipun paham-paham seperti demokrasi, hak-hak asasi manusia, keadilan, dll juga lahir dari sana.

Sistem sosial yang ditawarkan oleh negara-negara komunis telah berantakan berbarengan dengan bubarnya negara-negara komunis di Eropa Timur, terutama di bekas negara Uni-Soviet. Lalu bukan berarti bahwa untuk mewujudkan sistem ekonomi yang berkeadilan harus berpaling lagi pada sistem Ekonomi-Pasar dengan segala variasinya. Kalau tidak lantas sistem ekonomi model apa lagi? Boleh jadi salah satu alternatif yang paling pas untuk diterapkan dalam sistem sosial ekonomi di Indonesia adalah tawaran Bung Hatta tentang sosialisme Indonesia. Berkat perjuangan Mohammad Hatta maka UUD kita mempunyai beberapa pasal yang mengarahkan perjalanan bangsa kita (sebetulnya) menuju ke negara sosialis Indonesia (misal pasal 33 UUD 45).

Sayang dalam perjalanan

Republik kita ini, pasal itu tidak pernah dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Pasal 33 UUD 1945 mengatakan:

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Menurut Bung Hatta, pasal 33 ini adalah sendi utama bagi politik perekonomian dan politik sosial Republik Indonesia. Dasar perekonomian rakyat seharusnya berupa usaha bersama, dikerjakan secara kekeluargaan, koperasi. Cita-cita koperasi adalah menentang individualisme dan kapitalisme. Ia menciptakan masyarakat yang kolektif, berakar pada adat istiadat hidup Indonesia yang asli (gotong-royong), tetapi ditumbuhkan pada tingkat yang lebih tinggi, sesuai dengan tuntutan jaman modern. Karena berdasarkan asas kekeluargaan, didamaikan secara harmonis, apabila ada pertentangan, kepentingan orang seseorang dengan kepentingan umum. Dengan demikian koperasi mendidik dan memperkuat demokrasi sebagai cita-cita bangsa dan sendi negara yang keempat seperti tertanam dalam Pancasila (Hatta 1960, hlm. 46). Ide Hatta juga mirip dengan gagasan Soekarno tentang marhenisme.

Dalam ajaran tersebut, Sukarno tidak menghendaki dihapuskannya milik pribadi. Usahanya untuk membangun masyarakat sosialis Indonesia tidak jatuh sampai ke langkah langkah ekstrem melainkan cukup moderat. Yang penting dalam masyarakat sosialisme Indonesia mendatang tidak diperkenalkan adanya 'sistem kapitalisme—termasuk dalam usahanya membendung tumbuhnya sistem ini yaitu melalui penyitaan terhadap semua perusahaan besar. Hanya pemerintahlah yang boleh memiliki semua perusahaan besar. Di samping itu

rakyat atau kaum marhaen dikutsertakan untuk mengontrol seluruh mekanisme perusahaan baik yang besar maupun yang kecil (perusahaan kecil ini masih dimungkinkan untuk menjadi milik pribadi). Yang penting hasil produksi dari seluruh perusahaan itu digunakan untuk kepentingan seluruh rakyat, dan tidak memberi kesempatan kepada setiap orang untuk memiliki kekayaan secara berlebihan (Ibid.).

Gagasan dan pemikiran konseptual yang dikemukakan Hatta dan Soekarno tentang sosialisme ala Indonesia kiranya masih relevan dan sekarang juga mendapatkan momentumnya ketika apa yang disebut sebagai neososialisme mulai menggeliat di belahan bumi dunia ketiga, terutama yang terjadi di Amerika Latin. Setelah munculnya gerakan kiri Zapatista di barat daya Meksiko, Brazil mengejutkan dunia dengan terpilihnya calon dari Partai Buruh (*Partido Trabalhadores*) sebagai Presiden Brazil. Brazil kini dipimpin oleh Luiz Macio da Silva alias "Lula" yang menggunakan gerakan buruh, tani, cendekiawan, dan rohaniawan sebagai kendaraan politiknya (Aditjondro, 2006).

Kemenangan Lula di Brazil dibarengi naiknya Hugo Chavez ke tampuk kekuasaan di Caracas, Venezuela. Dengan keuntungan yang berlipat ganda dari sektor migas, Chavez mengalokasikan empat milyar dollar AS untuk program-program kesejahteraan sosial bagi kaum miskin yang meliputi 80% penduduk Venezuela serta untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan raya dan rel kereta api Chavez terpilih menjadi Presiden pada Pemilu 1998.

Kemenangan dan sepak terjang Hugo Chavez menimbulkan efek domino di kawasan Amerika Latin. Di Bolivia, di negara yang penduduknya 70% pribumi pada 22 Januari 2006 telah dilantik Evo Morales menjadi presiden pribumi, setelah pribumi negri itu ditaklukkan dan diperintah selama 180 tahun oleh minoritas kulit putih dari Spanyol. Evo Morales memperoleh lebih dari separuh suara dalam Pemilu 18 Desember 2005 dengan menggunakan *Movimiento al Socialismo* (Gerakan menuju Sosialisme) sebagai kendaraan politiknya. Platform politik partainya adalah: penghapusan sistem ekonomi neo-liberal; partisipasi bangsa-bangsa pribumi yang lebih besar dalam sistem politik nasional; nasionalisasi industri; legalisasi daun koka; dan pembagian lebih adil sumber daya nasional (Ibid).

Benang merah yang dapat ditarik dari berbagai gerakan kiri di Amerika Latin itu, mulai dari gerakan Zapatista sampai gerakan Partai Sosialis Chile di bawah pimpinan Bachelet (yang kemudian terpilih menjadi Presiden Chile di tahun 2006). Semangat anti-Neoliberalisme di bawah pimpinan AS sangat kentara. Para pemimpin baru itu sangat menghargai Fidel Castro dari Kuba dan siap untuk membangun suatu blok ekonomi Amerika Latin sebagai pengimbang bagi AS dengan NAFTA-nya (Ibdi).

Realitas arus pasang Gerakan Kiri di Amerika Latin lebih mendekati teori gerakan sosial baru, dari pasangan pemikir Post-Marxist, Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe. Konsep mereka merupakan revisi terhadap ajaran Marx yang melihat kaum buruh (proletar) sebagai subjek revolusioner utama. Konsep ini merangkum berbagai gerakan atau perjuangan yang tidak berbasis kelas dan bukan gerakan buruh. Gerakan mereka gerakan urban, gerakan lingkungan, gerakan anti-otoriterisme, gerakan anti-institusi, gerakan feminis, gerakan anti rasisme, gerakan etnis, gerakan rasional dan

gerakan perdamaian (Ibid).

Begitulah, ketika kapitalisme yang berlandaskan paham liberalisme dan neoliberalisme selama ini telah cukup lama berpengaruh dalam tata ekonomi politik di Indonesia, tetapi sekarang sudah mengindikasikan adanya tanda-tanda kegagalan ketika kesenjangan sosial ekonomi makin melebar. Bersamaan dengan itu, krisis ekonomi global sekarang ini juga menjadi pertanda bahwa Indonesia mesti melihat secara obyektif bahwa kapitalisme ternyata tidak mampu menjadi alternatif mujarab menuju cita-cita proklamasi. Oleh karena itu, geliat sosialisme yang sekarang telah melanda kawasan Amerika Latin, bisa menjadi alternatif yang relevan dengan kondisi Indonesia.